

| | | | | |
|----------|--------|------------|---------|--------------|
| PR. BAND | A. B. | SINAR H. | HALUAN | B. INDONESIA |
| B. BUANA | PELITA | S. KARYA | WASPADA | |
| H A R I | | : TANGGAL? | | 6 MAY 1986 |
| | | NO: | | |

Dr. Sudjoko MA: Pendidikan Kita Berhaluan Kota

Guru Dibutuhkan Tapi Tidak Dihargai

Bandung, 5 Mei.

Pendidikan di Indonesia selama ini memang berhaluan kota. Lulusan lembaga pendidikan normal, khususnya SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas) dan perguruan tinggi sangat enggan bekerja di desa, terlebih-lebih daerah pedalaman atau terpencil.

Berbicara dengan "SH" pekan lalu di Bandung, cendekiawan terkenal Dr. Sudjoko, MA menjelaskan, pendidikan kita yang berhaluan kota menciptakan anak didik jadi pekota. Artinya, pikiran, keinginan, selera, pandangan, dan ukuran-ukuran yang digunakan adalah kota. Kota merupakan tolok ukur untuk segala-galanya.

"Akibatnya, para anak didik atau lulusan sekolah mendapati, hasil pendidikan itu sama sekali

tidak cocok dengan desa. Isi pendidikannya tak cocok, hasil yang mau diterapkan juga tidak cocok dengan desa," ujar dosen senior Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (FSRD ITB) itu.

Budayawan berusia 58 tahun yang masih "sendirian" itu lebih jauh menguraikan, selama di sekolah anak didik tidak dilatih menceburkan diri ke dalam masalah dan suasana pedesaan. Dalam kurikulum Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi kita pada umumnya tidak terdapat mata ajaran, pengalaman, dan tugas yang membuat anak didik bisa menyesuaikan diri atau belajar menyesuaikan diri dengan desa dan daerah, khususnya yang terletak jauh sekali dari keramaian kota.

Berbagai keadaan membuat

desa-desa kita kurang menarik pula bagi lulusan SMTA dan PT. Misalnya, pembangunan di kota-kota besar sangat pesat, tidak demikian di desa. Ini ditambah dengan impian, bahwa masuk sekolah itu selalu bertujuan memperbaiki taraf hidup, bukan untuk mendalami ilmu pengetahuan atau hendak jadi ilmuwan.

"Yang namanya memperbaiki taraf hidup itu apa? 'Sederhana saja, hidup di kota, itu saja! Soal terbukti atau tidak, itu lain perkara," ujar Sudjoko tersenyum.

Jangan Menyalahkan!

Menanggapi "ulah" 216 calon guru SD di Sumatera Selatan yang ramai-ramai menolak mengajar di daerah-daerah pedalaman baru-baru ini ("SH" 29 April), Sudjoko mengingatkan, kita jangan langsung menyalahkan mereka begitu saja. Kita tak perlu menuduh, bahwa mereka tidak mencintai desa atau tidak memiliki semangat patriotisme seperti halnya pejuang kemerdekaan.

"Memang mereka boleh disalahkan, karena mereka tidak konsekuen dengan janji yang mereka tandatangani sebelumnya, bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi dalam surat perjanjian itu 'kan tidak ada pasal yang menyatakan, yang mengingkari janji dapat dijatuhi hukuman. Ini memang salah salah satu kelemahannya. Namun yang terpenting kita selidiki adalah sebab terdalam penolakan mereka bertugas di daerah pedalaman," kata alumnus Universitas Indonesia (1954) itu.

Menurut Sudjoko, sebetulnya para lulusan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) kita masih cinta desa dan mengajar. Namun, selama belajar di SPG, yang semuanya terdapat di kota, mereka sering mendengar, profesi guru itu merupakan profesi orang-orang yang dilupakan. Guru memang sangat dibutuhkan, tapi digencet juga, tak dihargai.

"Yang namanya guru itu di Indonesia sebetulnya dihinalah, dianggap sepi, kecil, diremehkan, dan bisa dipertanyakan begitu saja oleh siapa saja", keluh doktor seni rupa lulusan Ohio

State University, AS (1971) itu.

Lalu mereka merasa, me nyuruh mereka mengajar di desa, apalagi di pedalaman, itu sebagai suatu cara lain untuk membuat hidup mereka pahit. Mereka juga merasa, semakin jauh tinggal dari keramaian kota, semakin tak terjamin hidup mereka. Betul-betul tidak terjamin.

Harus Diistimewakan

Untuk mengatasi krisis guru SD di desa-desa yang jauh dari kota/jalan raya tsb, Sudjoko mengusulkan, agar pemerintah mengistimewakan para guru yang bertugas di desa-desa terpencil atau pedalaman itu. Kehidupan mereka di desa harus betul-betul terjamin dan menyenangkan.

"Menyenangkan itu bukan karena kehidupan di desa mewah, seperti adanya televisi berwarna dan kulkas, melainkan karena hidup dan karir mereka dijamin, diistimewakan, dan benar-benar diperhatikan. Hal-hal teknis yang dijamin dan diistimewakan tersebut harus dirinci, sehingga tergambar jelas".

Sebagai contoh, katanya lebih jauh, para guru yang bekerja di desa-desa yang jauh dari jalan raya/kota diberi bonus (insentif) bulanan, yang besarnya tergantung dari jaraknya dengan kota. Sekali setahun mereka diberi biaya melakukan perjalanan jauh, baik ke kota, maupun ke daerah/pulau lain. Mereka juga harus tetap dapat mengikuti perkembangan dunia melalui bahan-bahan bacaan yang mereka terima secara teratur.

Juga harus dijamin, gaji dan bonus dapat diterima tepat pada waktunya setiap bulan dengan utuh. Kenaikan gaji dan pangkat pun harus lebih besar dan cepat dibandingkan dengan yang mengajar di kota.

"Ini semua bukan usul yang aneh dan mustahil. Kalau pemerintah punya niat atau kemauan, ini semua bisa diwujudkan. Di banyak negara hal pembedaan semacam itu sudah lama dilakukan. Mengapa kita tak mau meniru yang baik?", tanyanya retorik.

"Sekarang bukan zaman revolusi atau zaman perjuangan kemerdekaan lagi. Dalam zaman pembangunan seperti sekarang, kaum muda tak bisa lagi kita suruh bekerja di desa dengan mengandalkan patriotisme, diindoktrinasi melalui penataran P-4. Atau melalui sandiwara-sandiwara naif dan lagu-lagu balada desa di TVRI, yang mengisahkan orang desa pindah ke kota, lalu hidupnya terlantar. Kemudian mereka kembali ke desa, dan ternyata hidupnya baik, nyaman dan tenteram. Itu semua 'kan terlalu naif, dan tak 'kan ada orang yang percaya", ujar Sudjoko tertawa sinis. (Srg/lu-1)